

## PEMKAB SORONG BERIKAN SUBSIDI HARGA IKAN KENDALIKAN INFLASI



Sumber: [www.detik.com](http://www.detik.com)

Pemerintah Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, mengadakan program subsidi untuk harga ikan dengan tujuan mengontrol inflasi dan meningkatkan daya beli masyarakat. Bhekti Giri Wahyuni, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sorong, menjelaskan bahwa subsidi ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk membantu masyarakat membeli ikan dengan harga yang terjangkau, khususnya dalam menghadapi masalah inflasi di wilayah tersebut. Subsidi ini diberikan kepada pedagang ikan di Pasar Warmon dan Pasar Mariat di mana 17 pedagang di Pasar Warmon dan enam pedagang di Pasar Mariat mendapat manfaatnya. Subsidi senilai Rp5 ribu per kilogram diberikan untuk tujuh jenis ikan yang dianggap berdampak langsung terhadap kenaikan inflasi. Penyaluran subsidi ini dijadwalkan dilakukan dua kali seminggu dari awal Juni hingga Oktober 2024, mengingat cuaca buruk yang mempengaruhi hasil tangkapan nelayan dan menyebabkan kenaikan harga ikan.

Anggaran total untuk subsidi ini mencapai Rp750 juta, yang mencakup subsidi selama hari raya besar dan subsidi harga ikan yang sedang berlangsung. Jenis ikan yang mendapatkan subsidi antara lain tuna, cakalang, mumar, lema, ikan dasar, cumi, dan udang. Program subsidi ini direncanakan berjalan selama tiga bulan ke depan, dengan penyesuaian tergantung pada kondisi keuangan yang tersedia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sorong untuk inflasi Mei 2024, tingkat inflasi year on year mencapai 4,12 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 104,87, lebih tinggi daripada tingkat inflasi nasional sebesar 2,84 persen sekitar 1,28 persen.

### Sumber Berita:

Antara Papua Barat, *“Pekab Sorong Berikan Subsidi Harga Ikan Kendalikan Inflasi”*, tanggal 8 Juni 2024.

**Catatan:**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, pada Lampiran menjelaskan bahwa Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan yang dilakukan secara efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tema rencana kerja pemerintah tahun 2024 adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, maka fokus pembangunan diarahkan kepada:

- a) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- b) peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan;
- c) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
- d) penguatan daya saing usaha;
- e) pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
- f) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
- g) percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN); dan
- h) pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024.